



MUKOMUKO

SENIN, 11 SEPTEMBER 2023

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Kejari Panggil Saksi Gedung PA Mukomuko

MUKOMUKO - Pembangunan gedung Pengadilan Agama (PA) Mukomuko pengerjaannya dimulai tahun 2022 sudah diperiksa banyak pihak banual bermasalah. Terbukti sekarang arget pembangunan tidak tercapai dan terjadi pemutusan kontrak terhadap pihak rekanan.

Padahal proyek gedung Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Mukomuko menelan anggaran Rp 20 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 dan 2023. Pemutusan kontrak oleh pihak PA Mukomuko karena tidak mencapai target 100 persen di awal Agustus.

Pembangunan gedung ini direncanakan tiga tahap. Tahap pertama dimulai pada 22 Agustus-19 Desember tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 6,5 miliar. Dinyatakan rampung dan sudah dilakukan pembayaran. Dilanjutkan pembangunan tahap dua tahun 2023 dengan total anggaran Rp 13,5 miliar. Ditargetkan awal Agustus pekerjaan harus 100 persen, agar dapat memasuki pembangunan tahap ketiga.

Namun berdasarkan hasil perhitungan oleh pihak PA Mukomuko pekerjaan belum sampai 100 persen. Sehingga pada 24 Agustus lalu dilakukan pemutusan kontrak terhadap pelaksana pembangunan PT Lematang Sukses Mandiri.

Sebagai solusinya pihak PA akan meminta Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Bengkulu melakukan perhitungan berapa besaran yang akan dibayarkan kepada pelaksana. Setelah dilakukan pembayaran, maka jumlah persen yang belum lirampungkan akan ditandera. Begitu juga untuk pengerjaan tahap ketiga.

Berkaitan dengan permasalahan pembangunan gedung PA Mukomuko, Weri Tri Kusuma SH, MH selaku Dewan Penasehat Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Mukomuko yang fokus menyoroti pengerjaan pembangunan gedung PA dari mulai tahun 2022 lalu mengatakan, dalam suatu pekerjaan memiliki target dan capaian. Semuanya dapat berjalan ketika masing-masing pihak menjalankan perannya.

Menurutnya, pembangunan tahap pertama sudah terlihat tidak mementingkan kualitas dan terkesan asal-asalan. Lantaran lahan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan merupakan rawa gambut, yang harus memiliki perlakuan khusus, tidak seperti pembangunan di lahan normal.

“Dari awal kami yakin bangunan tersebut akan bermasalah. Itu lahan gambut butuh penanganan khusus agar bangunan kokoh dan bertahan sebab jika dikerjakan seperti bangunan biasanya, kita dapat lihat bersama beberapa tahun ke depan bangunan akan turun dan miring, untuk Mukomuko tidak sedikit bangunan yang mengalami demikian,” katanya.

Wery juga menambahkan, pembangunan gedung PA ini menelan anggaran hingga Rp 20 miliar, tentunya jumlah tersebut tidak sedikit yang berasal dari uang pajak masyarakat guna pembangunan di daerah. Namun jika pembangunan tidak bisa dinikmati dan anggaran sudah dihabiskan, jelas ini bagian dari kerugian negara (KN) yang disebabkan karena lemahnya pengawasan dalam pekerjaan, termasuk memiliki kegiatan pihak PA Mukomuko.

“Kami berharap pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko agar dapat segera menaikkan status proyek gedung PA dari penyelidikan ke penyidikan. Dan menumpas siapapun yang terlibat dalam proyek bermasalah gedung PA tersebut,” harapnya.

Sementara itu Kepala Kejari Mukomuko Rudi Iskandar SH, MH melalui Kasi Pidsus Agung Malik Hakim SH, MH mengatakan berkaitan dengan adanya dugaan KN dalam pengerjaan pembangunan gedung PA Mukomuko yang dilaporkan masyarakat. Statusnya tengah dilakukan penyelidikan oleh penyidik Kejari Mukomuko untuk menemukan titik terang, dan melihat seperti apa unsur pidananya, dan aturan apa yang telah dilanggar. Maka dari itu direncanakan minggu ini dilakukan pemanggilan terhadap saksi untuk dimintai keterangan.

“Kami telah mengendakan pemanggilan saksi, yang pastinya secara bertahap. Saksi akan kita panggil untuk dimintai keterangan, sehingga dapat mengetahui apakah layak dinaikan status ke tahap penyidikan atau belum,”katanya.

Agung menambahkan, untuk pemanggilan saksi yang akan dimintai keterangan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan PA Mukomuko, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek gedung PA. Dana pihak rekanan, yang dilakukan pemutusan kontrak.

“Kita akan lihat apakah pengerjaan pembangunan gedung PA ini sesuai dengan ketentuan atau tidak. Setelah itu apa yang menyebabkan hingga di akhir target pembangunan tidak tercapai dilakukan 100 persen, sehingga berujung dengan pemutusan kontak,”sampainya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan gedung kanto PA Mukomuko Eko Yuliant mengatakan, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pemutusan kontrak pekerjaan pihak rekanan ini harus dilakukan. Sebab sudah dilakukan pemberian kesempatan sebanyak dua kali namun target penyelesaian juga tidak tercapai. Tahap ketiga tidak dapat dilanjutkan pembangunannya karena pembangunan tahap kedua ini tidak rampung.

“Kami akan hitung terlebih dahulu, dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Bengkulu, untuk mengetahui berapa besaran bobot pekerjaan yang harus dibayarkan. Kemudian barulah dapat dilanjutkan untuk finishing dengan melakukan lelang ulang,” tandasnya. (pir)